

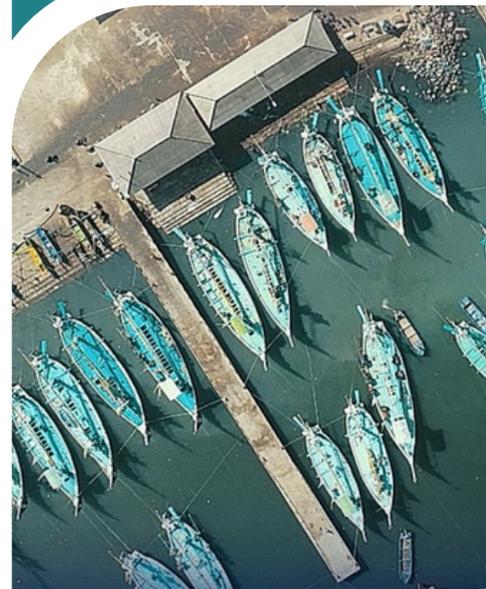


KKP
2025
#RISETOGETHER

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

TAHUN 2025



TRIWULAN II



LOTHARIA LATIF

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja Ditjen Perikanan Tangkap kepada instansi terkait dan publik sebagaimana berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara aktif mengawal implementasi kebijakan Ekonomi Biru, dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang berfokus pada transformasi tata kelola perikanan berbasis keberlanjutan sumber daya alam, sesuai dengan potensi

sumber daya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Program ini merupakan kontribusi nyata mewujudkan Asta Cita, yakni kemandirian bangsa melalui penguatan ketahanan pangan nasional (swasembada pangan).

Kami mengapresiasi dukungan yang telah diberikan berbagai instansi, *stakeholders*, dan seluruh lapisan masyarakat terhadap upaya pencapaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap. Semoga kerja sama yang terjalin dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara modern, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kami mengharapkan tanggapan maupun saran yang membangun. Semoga melalui Laporan Kinerja ini, peran strategis seluruh jajaran serta *stakeholders* semakin meningkat untuk dapat mendukung kinerja pembangunan perikanan tangkap di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 25 Juli 2025

Pt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Lotharia Latif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rencana kerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja DJPT mengacu kepada Sasaran Strategis (SS) KKP. Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2025 DJPT menetapkan 4 (empat) Sasaran Program (SP) dengan 4 (empat) Indikator Kinerja tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Guna mencapai Sasaran Program yang diharapkan, DJPT melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara periodik.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, seluruh indikator kinerja telah dilakukan pengukuran. Berdasarkan pengukuran kinerja yang memanfaatkan aplikasi Kinerjaaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>), capaian Skor Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial pada triwulan II tahun 2025 adalah 111,78 atau masuk dalam kriteria Istimewa (biru). Sebagian indikator kinerja yang harus diukur pada triwulan II tahun 2025 dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun dari sisi anggaran, berdasarkan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan pada periode triwulan II tahun 2025 DJPT telah merealisasikan anggaran sebesar Rp195.001.035.689 atau 18,86% dari pagu sebesar Rp1,033 triliun. Dalam menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada periode mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan KKP, K/L terkait serta *stakeholder* lainnya dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran di seluruh unit kerja lingkup DJPT. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup DJPT diharapkan dapat mendukung kinerja DJPT yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029	5
2.2 SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA	6
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	6
2.4 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
<i>Sasaran Program (SP-1): Kesejahteraan Nelayan Meningkatkan</i>	15
<i>Sasaran Program (SP-2): Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan</i>	17
<i>Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan</i>	18
<i>Sasaran Program (SP-4): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap</i>	20
3.3 KINERJA ANGGARAN	22

BAB 4 PENUTUP	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

1	Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	9
2	Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun 2025	14
3	Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Triwulan II Tahun 2025	15
4	Capaian IKU “Volume Produksi Perikanan Tangkap” Triwulan II Tahun 2025	17
5	Capaian IKU “Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan” Triwulan II Tahun 2025	19
6	Rencana Aksi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	19
7	Indikator Komposit Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi DJPT	21
8	Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kegiatan	22
9	Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	22
10	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan	22

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025	3
2	<i>Dashboard</i> Aplikasi Kinerja DJPT Triwulan II Tahun 2025	14
3	Grafik Pergerakan <i>Gap</i> It dan Ib	16

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang melimpah serta menjadi salah satu pilar dalam ketahanan pangan nasional. Potensi sumber daya ikan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Potensi ini menjadi salah satu modal utama untuk mewujudkan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu penguatan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan serta optimalisasi pembangunan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan pendekatan ekonomi biru (*blue economy*). Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan unit kerja di lingkungan KKP yang memiliki mandat strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra) KKP. Berkaitan dengan program ekonomi biru yang diterapkan oleh KKP, DJPT mengampu salah satu program prioritas yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem dan sumber daya ikan serta sekaligus mendorong peningkatan ekonomi di sektor kelautan perikanan dengan cara optimalisasi potensi perikanan nasional dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Kebijakan PIT juga merupakan suatu langkah nyata dalam mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional berbasis maritim sebagaimana tertuang pada agenda kedua Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Selain dukungan terhadap program prioritas KKP, DJPT terus melaksanakan program strategis lainnya dengan fokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, peningkatan infrastruktur industri perikanan tangkap, produktivitas nelayan, serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Keseluruhan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap pada tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tetap menjunjung

aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja publik, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara berkala. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan serta merupakan instrumen evaluatif untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, laporan ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program di masa yang akan datang untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Ditjen Perikanan Tangkap untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri serta dipimpin oleh Direktur Jenderal, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

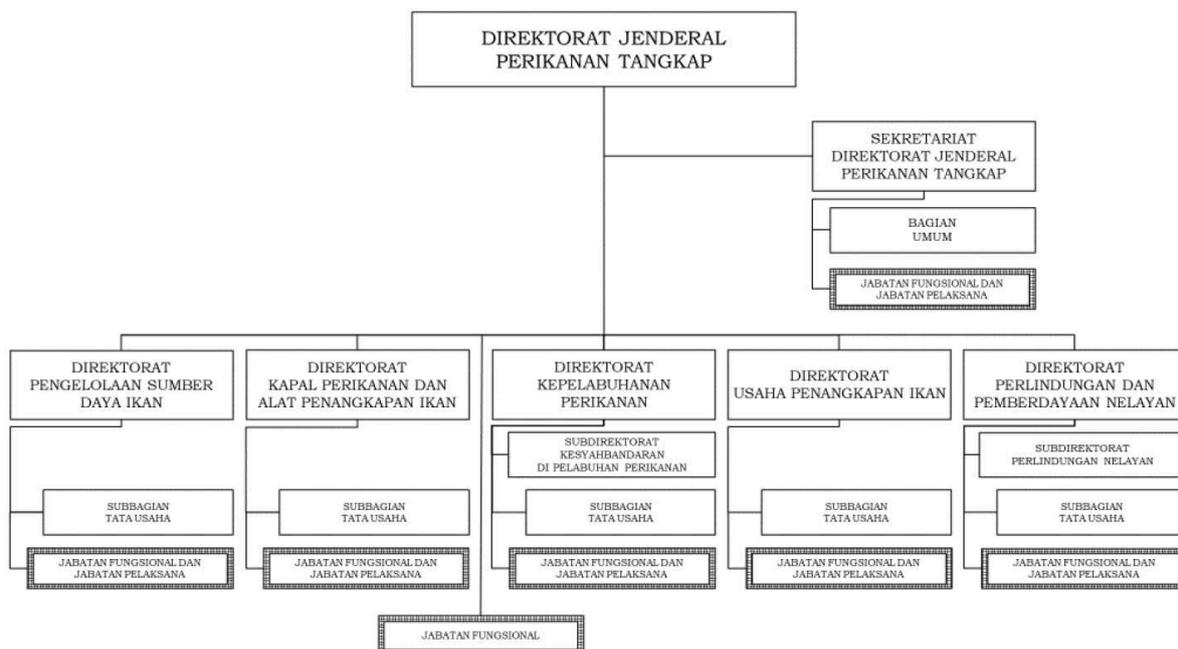
1. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan

- kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
 6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
4. Direktorat Kepelabuhanan Perikanan;
5. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan; dan
6. Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tergambar pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025

1.4. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta

kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

b. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

c. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

d. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

e. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

f. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Dirjen Perikanan Tangkap dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
2. **Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
3. **Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
4. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu:
 - a. Optimalisasi integrasi infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan;
 - b. Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan produktif; Reformasi tata kelola perizinan usaha perikanan tangkap.

3. **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Sasaran program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah **“Kesejahteraan Nelayan Meningkat”**, dengan indikator kinerja: Nilai Tukar Nelayan;
2. Sasaran program kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja: Volume produksi perikanan tangkap.
3. Sasaran program ketiga (SP-3) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja: Persentase implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan.
4. Sasaran program keempat (SP-4) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”**, dengan indikator kinerja: Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2025, secara rinci sebagai berikut:



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19
3.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	3	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	80
4.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	4.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	725.993.588.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	17.550.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14.550.000.000
5	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	451.884.165.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025		1.260.254.575.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	Pelaksanaan fasilitasi SeHAT nelayan
		Supervisi dan evaluasi pelaksanaan SeHAT nelayan
		Pelaksanaan pengembangan usaha nelayan dan usaha keluarga nelayan
		Fasilitasi akses pendanaan usaha nelayan melalui lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan)
		Evaluasi penyaluran pendanaan usaha nelayan
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Nelayan
		Pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan KUB dalam rangka pengembangan korporasi nelayan
		Pelaksanaan penataan kampung nelayan (Kalaju)
		Identifikasi dan verifikasi lokasi penataan kampung nelayan (Kalaju)
		identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya
		koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungannya
		Fasilitasi Sertifikasi Tanah Nelayan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum dan Kesejahteraan
		2
Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan		
Penyusunan bahan kebijakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan		
Pemantauan dan standarisasi permesinan kapal perikanan serta penggunaan bahan bakar untuk mesin kapal perikanan		
Implementasi kebijakan bidang kapal perikanan		
Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan		
Fasilitasi dan pembinaan peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan		
Identifikasi operasionalisasi bantuan sarana penangkapan ikan		
Penyusunan/reviu pedoman penerbitan dokumen awak kapal perikanan		
Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan		
Evaluasi pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan		
Penyusunan/reviu pedoman seleksi dan penetapan lembaga/instruktur pelaksana sertifikasi awak kapal perikanan dan pedoman sertifikasi awak kapal perikanan		
Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan		

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Evaluasi pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
		Pelaksanaan sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan
		Penyusunan/reviu pedoman fasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL)
		Penyusunan/reviu juknis bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan
		Pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan
		Pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya
		Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dilakukan pengendalian pembangunan/pengembangan fasilitasnya
		Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar
		Pelabuhan Perikanan yang dibina kegiatan kesyahbandarannya sesuai standar
		Pelaksanaan Pemantauan dan Analisis di Pelabuhan Perikanan
		Pengelolaan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)
		Fasilitasi Pelatihan Bidang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
		Petugas mutu di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya
		Tata kelola dan operasional Pelabuhan Perikanan di lokasi SKPT
		Penyiapan Tenaga Pendataan dan penugasan dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi
		Pendampingan dan Supervisi Operasional dalam menunjang pelaksanaan PNBP pasca produksi
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan
		Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional
		Identifikasi, analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan
		Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan
		Penyusunan/Reviu Pedoman Penataan Perizinan untuk mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
		Dukungan kegiatan penerapan penarikan PNBP pascaproduksi
		Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
		Penerbitan izin usaha penangkapan ikan
		Implementasi Integrasi Sistem Perizinan Pusat dan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Analisis Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP)</p> <p>Rekomendasi Bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun</p> <p>Pengujian dan Sertifikasi Sarana Penangkapan Ikan</p> <p>Optimalisasi Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis Sesuai Standar</p> <p>Optimalisasi Pengelolaan dan Operasional Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis Sesuai Standar</p> <p>Penguatan Sistem Pendataan Pelabuhan Perikanan untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Terluar dan/atau berwawasan lingkungan</p> <p>Fasilitasi Tata Kelola Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kepatuhan</p>
3	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	<p>Penyusunan/pelaksanaan RPP di WPPNRI Perairan Darat</p> <p>Identifikasi dan pengolahan data serta analisis kondisi perikanan di perairan darat dengan pendekatan ekosistem</p> <p>Operasionalisasi Lembaga WPPNRI Perairan Darat</p> <p>Pelaksanaan dan Evaluasi Rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang tongkol</p> <p>Reviu Pelaksanaan Strategi Pemanfaatan (Harvest Strategy) Perikanan Tuna Untuk Mendukung Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI</p> <p>Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional</p> <p>Sosialisasi pendaftaran kapal perikanan Indonesia ke RFMO</p> <p>Penghitungan dan Penyusunan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung Penangkapan ikan terukur</p> <p>Sosialisasi Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Pusat dan Daerah</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Alokasi Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>Inisiasi dan koordinasi pembentukan lembaga penetapan lembaga pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat</p> <p>Pengolahan, Analisis dan Pemanfaatan Data Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan</p> <p>Sosialisasi Penerapan e-Log Book Penangkapan Ikan</p> <p>Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Harvest Strategy untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p>

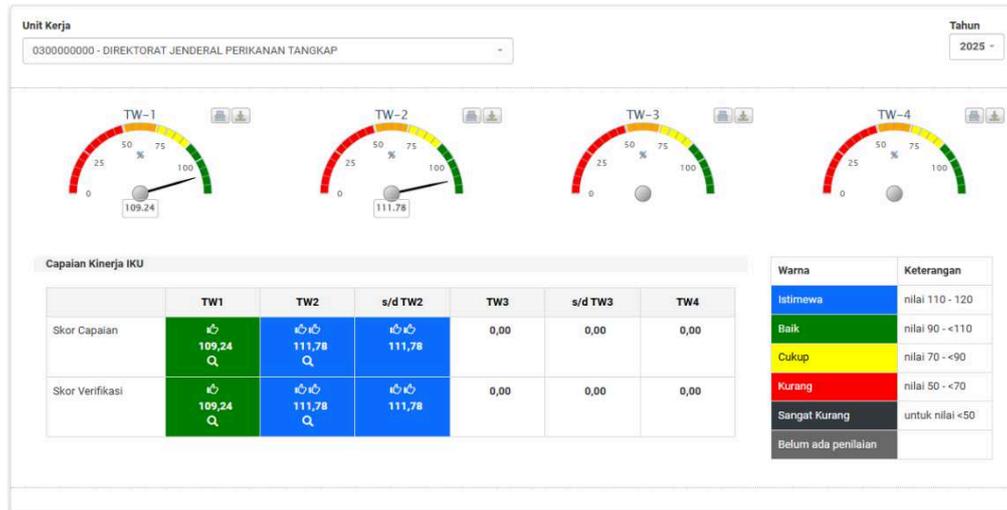
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		<p>Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem untuk mendukung Perikanan Terukur berbasis WPPNRI</p> <p>Penyusunan Ketentuan dan Pedoman Teknis Pemantau di atas Kapal Perikanan</p> <p>Pengolahan dan Analisis Data Pemantau di atas kapal perikanan dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan terukur</p> <p>Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Operasionalisasi LPPWPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan</p> <p>Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam mendukung Penangkapan Ikan Terukur</p> <p>Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan</p> <p>Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan</p> <p>Penguatan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Darat untuk Kelestarian dan Optimalisasi Sumber Daya Ikan</p>
4	<p>Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)</p>	<p>Penyusunan program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap</p> <p>Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap</p> <p>Penyusunan arsitektur informasi kinerja, sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan dan anggaran</p> <p>Penyusunan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus sub bidang Perikanan Tangkap serta koordinasi lintas sektor</p> <p>Reviu program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap</p> <p>Perencanaan dan penyelenggaraan sistem akuntansi instansi serta sosialisasi ketentuan pengelolaan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</p> <p>Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</p> <p>Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai</p> <p>Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional</p> <p>Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP</p> <p>Ketatalaksanaan Organisasi</p> <p>Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap</p> <p>Koordinasi lintas instansi dalam rangka pemantuan dan evaluasi</p> <p>Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Efisiensi Biaya Operasional</p>

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RENCANA AKSI
		Pengendalian internal pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengadaan, Monitoring, Serta Penyusunan Laporan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
		Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
		Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Kerjasama Internasional dan antar lembaga (Pemerintah dan non pemerintah) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT
		Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT
		Survey dan Analisis Kualitas Layanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap serta Sosialisasi, monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan/peraturan
		Pendampingan Hukum
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
		Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan
		Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
		Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
		Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Integritas
		Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap pada triwulan II tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menitikberatkan pada 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerja DJPT Triwulan II Tahun 2025

Capaian kinerja DJPT pada triwulan II tahun 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU sebesar 111,78. Meskipun demikian, masih terdapat IKU yang belum mencapai target, yaitu IKU Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN tidak tercapai karena sepanjang triwulan II tahun 2025 peningkatan pendapatan nelayan dari hasil penangkapan ikan belum mampu mengimbangi kenaikan biaya konsumsi dan produksi rumah tangga nelayan.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada triwulan II tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun 2025

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TRIWULAN II TAHUN 2025				
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105	103,35	98,43	
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19	2,90	3,39	116,90
3	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	3	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	80	20	52,81	269,05

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK 2025	TRIWULAN II TAHUN 2025				
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	4	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	Periode Pengukuran Tahunan		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Program dan indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Program (SP-1) : Kesejahteraan Nelayan Meningkat

Sasaran Program-1 “Kesejahteraan nelayan meningkat”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN). Kesejahteraan masyarakat nelayan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam hal ini DJPT senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh nelayan melalui program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk optimasi pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

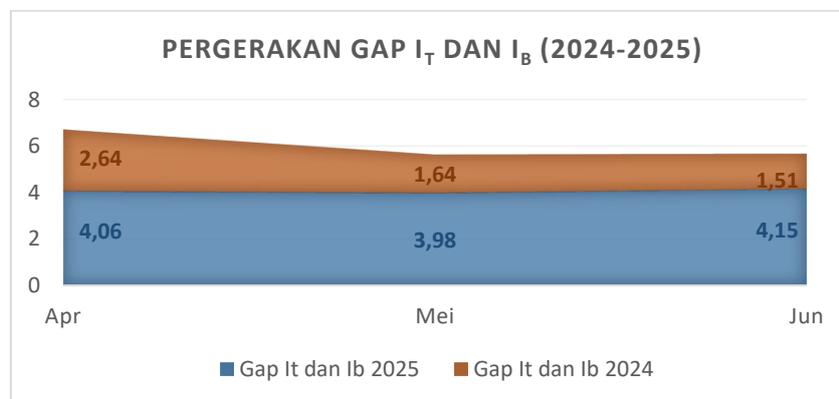
NTN adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan nelayan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 3. Capaian IKU “Nilai Tukar Nelayan (NTN)” Triwulan II Tahun 2025

SP 1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat											
IKU 1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)											
Realisasi TW II 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	% Realisasi thd Target TW II 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra	
98,80	103,65	107,06	106,35	101,62	105	105	103,35	98,43	98,43	105	98,43	

Selama triwulan II tahun 2025, NTN belum dapat mencapai target, namun nilai tertinggi NTN pada bulan Juni sebesar 103,42 dan terendah pada bulan Mei sebesar 103,29. Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024, realisasi triwulan II tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,71%. Data sepanjang triwulan II tahun 2025 menunjukkan, meskipun Indeks Harga yang Diterima (I_t) nelayan mencapai 125,29, yang menunjukkan adanya peningkatan harga jual hasil tangkapan (meningkat 0,96% dari triwulan II), laju peningkatan tersebut tidak sebanding dengan laju kenaikan Indeks Harga yang Dibayar (I_b) yang mencapai 121,23 (meningkat 0,99% dari triwulan II). Hal ini didukung dari biaya konsumsi rumah tangga yang masih tinggi dan mengalami kenaikan, khususnya komponen Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan peningkatan mencapai 13,55% dibanding triwulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir Renstra tahun 2025 sebesar

105 posisi capaian triwulan II tahun 2025 sudah mencapai 98,43%. Berdasarkan wilayah administratif, NTN tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian sebesar 128,05 dan NTN terendah berada di Provinsi DKI Jakarta dengan capaian sebesar 111,83.



Gambar 3. Grafik Pergerakan $Gap I_t$ dan I_b

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa *gap* antara Indeks Harga yang Diterima Nelayan (I_t) dan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (I_b) triwulan II tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan *gap* antara I_t dan I_b pada tahun 2024. Kemudian jika dilihat dari pergerakan, I_t dan I_b pada tahun 2025 semakin membesar di bandingkan dengan tahun 2024. Hal ini yang mengakibatkan nilai NTN triwulan II tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan triwulan II tahun 2024.

Kondisi NTN yang belum tercapai menggambarkan bahwa sepanjang triwulan II tahun 2025, I_t memperlihatkan adanya pertumbuhan namun tidak cukup tinggi (moderat) yang menunjukkan harga jual hasil tangkapan naik hanya sedikit. Untuk dapat mencapai target NTN sebesar 105 dibutuhkan pertumbuhan I_t yang lebih tinggi. Kemudian I_b pada triwulan ini tetap tinggi dan tidak memperlihatkan penurunan (sedikit naik). Biaya Konsumsi Rumah Tangga, tetap tinggi dan mengalami kenaikan signifikan sehingga mengakibatkan daya beli nelayan tergerus. Data dari Badan Pusat memperlihatkan indeks penyusun Konsumsi Rumah Tangga di beberapa sektor mengalami kenaikan seperti Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (97,48 ke 110,69) dan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya () sehingga berakibat menahan laju kenaikan NTN.

Dalam mencapai NTN, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung, seperti:

- rapat koordinasi peningkatan Nilai Tukar Nelayan dengan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- rapat tindak lanjut Mekanisme Penyaluran BBM Bersubsidi bagi Nelayan;
- rapat koordinasi terkait Indikator Kesejahteraan Nelayan dalam Rancangan Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029;
- partisipasi pada Lokakarya Pemangku Kepentingan dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga Nelayan Pesisir Indonesia lintas instansi dari BRIN, IPB, KNTI, dan University of Technology Sidney Australia; serta
- Verifikasi calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan nelayan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM nelayan dalam hal cara penanganan ikan yang baik agar hasil tangkapan lebih bermutu, fasilitasi serta penyediaan akses permodalan yang terjangkau dan berbunga rendah, pengembangan diversifikasi produk dari hasil tangkapan, penguatan koperasi nelayan, serta

optimalisasi peran BUMN/Koperasi/UMKM sebagai *offtaker* hasil tangkapan nelayan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan biaya dilakukan melalui percepatan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan yang tepat sasaran dan merata, peningkatan kapasitas SDM nelayan dalam hal manajemen keuangan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi penangkapan ikan hemat energi, akselerasi penerbitan rekomendasi pembangunan SPBUN, inventarisasi serta pemberian rekomendasi terkait kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan kepada BPH Migas, serta mendorong partisipasi nelayan terkait asuransi dan jaminan sosial.

3.2.2. Sasaran Program (SP-2) : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan

Sasaran Program-2 “Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan”, memiliki IKU (Indikator Kinerja Utama) yakni volume produksi perikanan tangkap. Sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, Ditjen Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya ikan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan. Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan industrialisasi perikanan tangkap yang berdaya saing.

Volume produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap terdiri dari volume produksi yang di daratkan di laut maupun perairan darat. Produksi perikanan tangkap berasal dari pelabuhan perikanan dan hasil agregasi kabupaten/kota dengan menggunakan metode sampling. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusdatin KKP.

Tabel 4. Capaian IKU “Volume Produksi Perikanan Tangkap” Triwulan II Tahun 2025

SP 2											
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan											
IKU 2											
Volume Produksi Perikanan Tangkap											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	% Realisasi thd Target TW II 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra
3,79	3,87	3,92	3,92	3,34	6,19	2,90	3,39	116,90	54,77	6,19	54,77

Volume produksi perikanan tangkap triwulan II tahun 2025 sebesar 3,39 juta ton atau mencapai 116,90% dari target triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 2,90 juta ton. Volume produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari 93,2% produksi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 3,17 juta ton dan sisanya sebesar 6,8% atau 0,23 juta ton berasal dari perairan darat. Hal ini menunjukkan bahwa produksi triwulan II tahun 2025 telah mencapai target. Laporan produksi yang didaratkan di pelabuhan perikanan UPT pusat dan beberapa UPT daerah pada triwulan II tahun 2025 menunjukkan peningkatan produksi sebesar 1,50 persen dibandingkan dengan produksi pada triwulan II tahun 2024 (*year on year*). Peningkatan produksi yang cukup signifikan di beberapa pelabuhan UPT Pusat antara lain PPS Cilacap, PPS Belawan, PPS Kendari, PPS Bitung, PPN Prigi, PPN Palabuhanratu, PPN Sungailiat, PPN Tanjungpandan, PPN Kwandang, PPN Tual, dan PP Selat Lampa.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target volume produksi perikanan tangkap diantaranya:

- a. Optimalisasi pelayanan rutin pelabuhan perikanan (layanan tambat labuh, pembongkaran ikan, penerbitan SPB, SHTI, dan pelayanan lainnya);
- b. Operasionalisasi pelabuhan perikanan secara konsisten dalam rangka menjaga stabilitas produksi perikanan;
- c. Kolaborasi dengan BMKG dalam penyediaan informasi kondisi cuaca dan pasang surut secara *realtime* untuk nelayan;
- d. Rapat koordinasi lintas instansi terkait pembahasan kerja sama riset perikanan tangkap dan potensi kerja sama investasi;
- e. pengajuan izin prakarsa penetapan Pelabuhan Perikanan sebagai Objek Vital Nasional;
- f. rapat monitoring dan evaluasi kinerja capaian PNPB SDA perikanan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap, yaitu: 1) percepatan penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan untuk nelayan; 2) Penguatan koperasi nelayan sebagai mitra distribusi hasil tangkapan dan pengadaan sarana produksi; 3) koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan; 4) mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan; serta 5) pelaksanaan bimbingan teknis bagi nelayan terkait optimalisasi kegiatan penangkapan, keselamatan bekerja, serta manajemen keuangan.

3.2.3. Sasaran Program (SP-3): Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan

Sasaran Program-3 “Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan”, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara terkendali, terukur, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pengelolaan sumber daya ikan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya dan implementasinya, dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan. Tujuan utama pengelolaan sumber daya ikan dititikberatkan untuk mencapai pemanfaatan yang berkelanjutan dan optimal, dengan menjaga kelestarian populasi ikan dan lingkungan perairan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal ini mencakup aspek biologis, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Indikator ini menunjukkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan, melalui pendekatan kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan, sesuai dengan karakteristik masing-masing WPPNRI.

Pengukuran indikator kinerja ini didapatkan dari persentase pelaksanaan rencana aksi dalam kebijakan dengan masing-masing bobot berikut: a) Pengelolaan SDI Laut Teritorial dan

Perairan Kepulauan (20%); b) Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas (20%); c) Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (20%); d) Logbook Penangkapan Ikan dan Alokasi Kuota Sumber Daya Ikan (20%); dan e) Pemantauan di atas Kapal Perikanan (20%).

Tabel 5. Capaian IKU “Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan” Triwulan II Tahun 2025

SP 3											
Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan											
IKU 3											
Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan											
Realisasi TW I 2020-2024					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Tahun 2025	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	% Realisasi thd Target TW II 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target Renstra 2025	% Capaian TW II thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	80	20	53,81	269,05	67,26	80	67,26

Indikator kinerja persentase implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan pada triwulan II atau semester I telah mencapai 53,81 dari target sebesar 20 dengan realisasi sebesar 269,05%. Capaian ini diperoleh dari perhitungan nilai akhir tiap rencana aksi dari persentase implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya ikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Rencana Aksi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Kegiatan	Kebijakan	Rencana Aksi	% Bobot	Nilai Akhir
Pengelolaan SDI Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan dan Kelembagaan WPPNRI	Peraturan Menteri KP terkait RPP WPPNRI dan RPP jenis/kelompok jenis Sumber Daya Ikan	Pelaksanaan pengelolaan SDI di laut teritorial dan perairan kepulauan	20	11,14
		Penyusunan <i>Harvest Strategy</i>		
Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas	Keputusan Menteri KP Nomor 121 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol	Rekomendasi Pengelolaan SDI beruaya Jauh di forum regional	20	7,2
		Pelaksanaan pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas		
Pengelolaan Perikanan Perairan Darat	Kepmen KP Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat	Pengelolaan SDI di WPPNRI Perairan Darat	20	9,72
	Permen KP Nomor 9 Tahun 2020 tentang WPPNRI di Perairan Darat	Penyusunan profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat		
Log Book Penangkapan Ikan dan Alokasi Kuota Sumber Daya Ikan	Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	Pelaksanaan Log Book Penangkapan Ikan	20	15,75
		Penghitungan Alokasi Kuota SDI		
Pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan	Penempatan Observer di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	20	10
		Laporan Pemantauan		
Nilai Akhir				53,81

- Dalam upaya memenuhi target indikator kinerja ini, DJPT telah melaksanakan kegiatan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan Menteri KP tentang Kuota Penangkapan Ikan;
 - b. pertemuan terkait *Harvest Control Rules* (HCR) untuk Cumi-cumi dan Lemuru;
 - c. penyampaian laporan delegasi Indonesia ke Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dan The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT);
 - d. pertemuan terkait rumpon dan tata kelola kuota penangkapan tuna;
 - e. penyusunan rancangan Keputusan Menteri KP tentang Strategi Pemanfaatan Tuna Tropis di WPPNRI 713, 714, dan 715;
 - f. penyusunan rancangan Master Data Jenis Ikan di Perairan Darat serta rancangan Petunjuk Teknis Standar dan Prosedur Pendataan Pemanfaatan SDI di Perairan Darat;
 - g. rapat koordinasi Urgensi Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat;
 - h. rapat pembahasan Metode dan Format Penetapan Potensi SDI di Perairan Darat;
 - i. penilaian indikator EAFM untuk WPPNRI-Perairan Darat 432, 433, dan 434;
 - j. pertemuan terkait Penghitungan Alokasi Kuota Sumber Daya Ikan; dan
 - k. penyusunan 3 rancangan SOP terkait Pemantauan di atas Kapal Perikanan.

3.2.4.Sasaran Program (SP-4): Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

Sasaran Program-4 “Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”, memiliki Indikator Kinerja Manajerial yakni Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Sasaran program ini bertujuan untuk mengukur implementasi Reformasi Birokrasi *General* lingkup DJPT yang berasal dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait. Dalam mengukur kemajuan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diperlukan serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai yang disebut evaluasi reformasi birokrasi.

Evaluasi terhadap RB *General* adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Evaluasi dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian RB di instansi pemerintah; memantau rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi RB periode sebelumnya; serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian RB. Nilai indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa. Evaluasi RB *General* ini penting untuk memastikan bahwa upaya reformasi birokrasi memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator komposit pembentuk nilai implementasi RB disusun dalam tabel berikut:

Tabel 7. Indikator Komposit Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi DJPT

Indikator Kinerja	Satuan	Bobot
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	5
Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	10
Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	5
Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	5
Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	10
IKPA Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	10
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	10
Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	10
Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	Indeks	10
Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	5
Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang Perikanan Tangkap	Persen	5
Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	5
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	5
Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	5

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap karena periode pengukuran dilakukan secara tahunan. Namun dalam upaya memenuhi target indikator kinerja ini, DJPT telah melaksanakan kegiatan:

1. koordinasi dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II dan unit kerja lingkup DJPT dalam rangka pemantauan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan sampai tuntas;
2. pemantauan pembangunan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada PPS Belawan, PPN Pengambengan, dan PPN Karangantu;
3. ikut serta dalam kegiatan penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025;
4. fasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas;
5. penetapan Kepmen KP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau; Kepmen KP Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Suka Bangun, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Suka Bangun; dan Kepmen KP Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan Selakau;
6. bantuan hukum litigasi kepada Syahbandar PPP Pondok Dadap dan penyusunan PKS antara PPS Nizam Zachman Jakarta dengan PT. Perikanan Indonesia;
7. rapat pembahasan identifikasi risiko serta persiapan penilaian mandiri maturitas SPIP;
8. sosialisasi Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 dan verifikasi dokumen Pengawasan Kearsipan Internal lingkup kantor pusat Tahun 2025; dan
9. penyusunan matriks identifikasi uraian fungsi, proses bisnis, dan SOP lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

3.3. Kinerja Anggaran

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.260.254.575.000,- atau naik 28% dari pagu alokasi anggaran tahun 2024. Namun dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, maka alokasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap terkena efisiensi menjadi Rp1.033.852.998.000,-. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp195.001.035.689 atau mencapai 18,86%. Anggaran tersebut 63,31% digunakan untuk belanja pegawai; 36,39% untuk belanja barang; dan 0,29% untuk belanja modal.

Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kegiatan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000	32.533.404.000	345.165.356	1,06
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	725.993.588.000	656.250.359.000	14.264.740.109	2,17
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	17.550.000.000	3.142.751.000	478.576.123	15,23
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14.550.000.000	3.233.465.000	1.727.677.978	53,43
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPT	451.884.165.000	338.693.019.000	178.184.876.123	52,61
TOTAL		1.260.254.575.000	1.033.852.998.000	195.001.035.689	18,86

Tabel 8. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	206.783.053.000	206.783.053.000	123.450.059.573	59,70
2	Belanja Barang	500.613.782.000	303.794.814.000	70.967.154.811	23,36
3	Belanja Modal	552.857.740.000	523.275.131.000	583.821.305	0,11
TOTAL		1.260.254.575.000	1.033.852.998.000	195.001.035.689	18,86

Tabel di atas memperlihatkan bahwa besar anggaran Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan jenis belanja, realisasi triwulan II tahun 2025 hampir sama dengan realisasi triwulan II tahun 2024 yakni belanja pegawai lebih besar dibandingkan belanja barang maupun modal. Belanja pegawai merupakan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat yang dibayarkan secara rutin.

Tabel 9. Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Pusat	397.304.639.000	265.402.136.000	53.528.331.919	20,17
2	UPT	850.491.092.000	768.286.562.000	141.339.956.888	18,40
3	Tugas Pembantuan	12.458.844.000	164.300.000	132.746.882	80,80
TOTAL		1.260.254.575.000	1.033.852.998.000	195.001.035.689	18,86

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan kewenangannya, pada periode triwulan II tahun 2025 realisasi tertinggi adalah pada kewenangan Tugas Pembantuan, sedangkan yang realisasi terendah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini disebabkan pada triwulan II, realisasi masih terbilang cukup rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru akan dimulai pasca penyesuaian anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB 4. PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan salah satu unit eselon eselon I dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Perikanan Tangkap berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPT, dan perjanjian kinerja antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Laporan Kinerja (LKj) DJPT triwulan II tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) selama triwulan II tahun 2025. Terhadap capaian tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Pada tahun triwulan II tahun 2025, rata-rata pencapaian sasaran strategis DJPT adalah sebesar 111,78% (bernilai Istimewa). Berdasarkan target pada rencana aksi Ditjen Perikanan Tangkap triwulan II tahun 2025, dari total 4 Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang capaiannya belum 100%, yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan capaian sebesar 103,39 NTN tidak tercapai karena sepanjang triwulan II tahun 2025 meskipun harga jual ikan (tangkapan) yang diterima nelayan mengalami sedikit peningkatan dari April s.d. Juni, namun belum dapat mengimbangi peningkatan biaya konsumsi rumah tangga nelayan masih tinggi dan cenderung stabil, sehingga menggerus keuntungan atau daya beli nelayan. Namun 2 (dua) indikator kinerja lain menunjukkan capaian di atas 100%, yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap (capaian 3,39 juta ton atau 120,57% dari target) serta Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (capaian 53,81 atau 269,05% dari target).

Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp195.001.035.689 dari total pagu Rp1,033 triliun. Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, diperlukan beberapa rencana aksi:

- Melakukan verifikasi capaian kinerja secara berkala untuk seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap baik di Pusat maupun UPT; dan
- Memaksimalkan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan strategis agar penyerapan anggaran triwulan II lebih meningkat.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19
3.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	3	Persentase Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan (%)	80
4.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	4.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	725.993.588.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	17.550.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	14.550.000.000
5	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	50.276.822.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	451.884.165.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025		1.260.254.575.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif